Lampiran: Panduan dan Contoh Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permohonan Kebijakan Pengecualian dalam Bentuk Penundaan Kewajiban Penggunaan Rupiah

SURAT PERMOHONAN

Merupakan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha/asosiasi/otoritas yang mengajukan permohonan (pemohon) kebijakan pengecualian dalam bentuk kewajiban penggunaan Rupiah. Di dalam dokumen ini, pemohon diharapkan dapat menjelaskan ***substansi paling sedikit terkait kebutuhan pengecualian, pertimbangan atas kebutuhan pengecualian, dan aktivitas/jenis transaksi yang dikecualikan****. Surat permohonan* ***ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat atau setara Direksi.*** *Surat permohonan yang dibuat oleh otoritas/asosiasi pelaku usaha dapat mewakili seluruh/sebagian pelaku usaha binaan/anggotanya, akan tetapi kelengkapan dokumen tetap perlu dipenuhi oleh tiap individu pelaku usaha yang dimohonkan dalam surat permohonan tersebut.*

Berikut adalah contoh format Surat Permohonan yang dapat dijadikan acuan oleh pemohon:

No. : Tempat, Tanggal

Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

[Pendahuluan Surat]

I. Kebutuhan Pengecualian
   Di dalam bagian ini pemohon diharapkan dapat menjelaskan kondisi yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan kebijakan pengecualian dalam bentuk penundaan kewajiban penggunaan Rupiah.
II. Pertimbangan atas Kebutuhan Pengecualian
   Di dalam bagian ini pemohon dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan atas kebutuhan pengecualian yang telah disebutkan di bagian I. Di dalam bagian ini juga dapat dijelaskan secara singkat hal-hal yang dijelaskan di dalam dokumen Analisa Pelaku Usaha.
III. Aktivitas/Jenis Transaksi yang Dikecualikan
   Di dalam bagian ini disebutkan aktivitas/jenis transaksi apa yang dimohonkan agar dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah, termasuk jangka waktu, serta kuotasi dan pembayaran yang diperlukan untuk dapat dikecualikan atas kewajiban penggunaan Rupiah.

[Penutup Surat]

Tempat, Tanggal

Nama
Jabatan

PROFIL PERUSAHAAN

Berisi profil perusahaan antara lain aktivitas bisnis dan produk yang dihasilkan, struktur organisasi, beserta proses bisnis perusahaan yang mencakup antara lain proses produksi, model bisnis pembelian/penjualan. Di dalam dokumen ini pemohon diharapkan agar dapat menjelaskan identitias perusahaan serta lingkup aktivitas bisnis perusahaan. Uraian dapat berupa narasi, flowchart, atau bentuk lainnya.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI

Dokumen yang menyatakan bahwa baik surat permohonan beserta seluruh dokumen yang dilampirkan menyampaikan informasi benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat atau setara Direksi di atas meterai 10.000.

Berikut adalah contoh format Surat Pernyataan Kebenaran dan Kelengkapan Informasi yang dapat dijadikan acuan oleh pemohon:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh dokumen, informasi, data, dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengajuan permohonan kebijakan pengecualian dalam bentuk penundaan kewajiban penggunaan Rupiah adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sah dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat permohonan diajukan.
3. PT xxx bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen, informasi, data, dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen, informasi, data, atau keterangan yang disampaikan tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka PT xxx bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun untuk memenuhi persyaratan permohonan kepada Bank Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

(meterai Rp10.000) dan
tanda tangan

Nama
Jabatan

ANALISA PELAKU USAHA

Dokumen analisa perusahaan adalah dokumen yang disusun pelaku usaha untuk menjelaskan dan menganalisa 4 aspek (kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, dan dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional) apabila kewajiban penggunaan Rupiah diterapkan, serta alasan mengapa perusahaan membutuhkan pengecualian dalam bentuk penundaan.

Berikut struktur dan isi dokumen analisa pelaku usaha yang dapat menjadi acuan oleh pelaku usaha:

I. Pendahuluan

Berisi deskripsi singkat dari ruang lingkup kegiatan pelaku usaha, serta transaksi yang memerlukan pengecualian dalam bentuk penundaan kewajiban penggunaan Rupiah, disertai dengan alasan yang mendasari permohonan dimaksud.

II. Analisa Kesiapan Pelaku Usaha

Berisi uraian mengenai kegiatan operasional dan/atau struktur bisnis pelaku usaha yang masih menggunakan valuta asing, termasuk jenis aktivitas maupun komponen proses bisnis yang saat ini masih bergantung pada penggunaan valuta asing. Uraian tersebut juga perlu menjelaskan penyebab atau permasalahan pelaku usaha masih bergantung pada penggunaan valuta asing.

III. Analisa Kontinuitas Kegiatan Usaha

Berisi uraian/ mengenai risiko terhadap kontinuitas kegiatan usaha yang akan dihadapi pelaku usaha apabila kewajiban penggunaan Rupiah diterapkan. Uraian tersebut juga perlu menjelaskan dampak yang berpotensi timbul apabila pelaku usaha terpapar risiko tersebut, antara lain terkait dengan penyesuaian sistem dan proses bisnis, mekanisme pembayaran, struktur biaya, ataupun aspek lainnya. Selanjutnya, pelaku usaha menyampaikan data dan/atau informasi pendukung yang relevan untuk menggambarkan besaran risiko dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan dasar yang memadai dalam menilai dampak penerapan kewajiban penggunaan Rupiah terhadap kontinuitas kegiatan usaha.

IV. Analisa Kegiatan Investasi

Berisi uraian mengenai kegiatan investasi yang telah dan/atau sedang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti sumber pembiayaan, bentuk investasi yang sedang dilakukan, rencana ekspansi, pihak yang melakukan investasi, dan komponen investasi lainnya. Uraian tersebut juga perlu menjelaskan dampak yang dapat timbul terhadap komitmen pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan investasi apabila kewajiban penggunaan Rupiah diterapkan.

V. Analisa Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Berisi uraian mengenai kontribusi pelaku usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti melalui penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, kegiatan ekspor dan/atau impor, serta kontribusi lainnya terhadap sektor ekonomi terkait. Uraian tersebut juga perlu menjelaskan dampak yang berpotensi timbul terhadap pertumbuhan ekonomi nasional apabila kewajiban penggunaan Rupiah diterapkan, khususnya apabila penerapan tersebut memengaruhi daya saing pelaku usaha, aktivitas ekspor dan/atau impor pelaku usaha maupun aktivitas ekonomi lainnya. Selanjutnya, pelaku usaha dapat menyampaikan data dan/atau

informasi pendukung yang relevan dan terukur untuk menunjukkan besaran kontribusi pelaku usaha terhadap perekonomian nasional. Analisa yang diberikan dapat berupa analisa dari sisi individu pelaku usaha dan/atau industry wide.

VI. Kesimpulan

Berisi rangkuman kebutuhan atas kebijakan pengecualian dalam bentuk penundaan dan dampak dari penerapan kewajiban penggunaan Rupiah terhadap kondisi pelaku usaha.

DOKUMEN *ACTION PLAN*

Dokumen Action Plan merupakan dokumen yang dibuat oleh pemohon sebagai bentuk penyampaian rencana transisi dari penggunaan valuta asing (valas) menjadi menggunakan mata uang Rupiah untuk transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Di dalam dokumen ini, pemohon diharapkan dapat menjelaskan langkah yang akan ditempuh beserta jangka waktunya (maksimal 10 tahun) dan tahapan (bila ada) agar dapat mengimplementasikan secara penuh kewajiban penggunaan Rupiah.

Contoh action plan beserta jangka waktu dan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Periode	Program Kerja	Target
Tahap I: Persiapan	Tahun ke-x-x	Langkah awal yang dilakukan dalam mempersiapkan kewajiban penggunaan Rupiah	Target output dari pelaksanaan program kerja
Tahap II: Aktivitas untuk tercapainya penerapan kewajiban penggunaan Rupiah	Tahun ke-x-x	Langkah dari aktivitas agar tercapainya penerapan kewajiban penggunaan Rupiah	Target output dari pelaksanaan program kerja
Tahap III: Implementasi kewajiban penggunaan Rupiah	Tahun ke-x-x	Langkah yang dilakukan dalam implementasi Rupiah secara penuh	Target output dari pelaksanaan program kerja